

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan pengembangan Pendidikan Luar Biasa, maka layanan pendidikan bagi siswa tunanetra dapat dilaksanakan dalam dua bentuk penyelenggaraan pendidikan. *Pertama*, pendidikan yang dibangun di atas paradigma pendidikan eksklusif atau segregatif yang dikenal dengan istilah Sekolah Luar Biasa, khusus untuk siswa tunanetra disebut dengan SLB Bagian Tunanetra. *Kedua*, pendidikan yang dibangun di atas paradigma pendidikan integratif. Sekolah terpadu merupakan salah satu bentuk pendidikan yang intergratif, yaitu model pendidikan yang merupakan issue aktual yang mewarnai perkembangan pendidikan luar biasa di Indonesia saat ini.

Dalam tataran implementasinya, keberadaan pendidikan terpadu memiliki dasar yuridis yang tercantum dalam Keputusan Mendikbud No. 22/O/1979 tentang penyelenggaraan Pendidikan Terpadu (Depdikbud, 1983/1984). Untuk pelaksanaan Pendidikan Terpadu, keputusan Depdikbud tersebut dipertegas kembali dengan Keputusan Mendikbud No. 002/U/1986, penyelenggaraan Pendidikan Terpadu dirasakan lebih baik, terutama bagi siswa yang mempunyai kemampuan sama dengan siswa normal, sebab filosofis yang terkandung dalam Sekolah Terpadu tersebut memandang kesempatan pendidikan

(*opportunity of education*) tidak dibatasi lagi dalam konteks setting (tempat) secara eksklusif, akan tetapi memiliki kesamaan peluang (*opportunity equality*) bagi siswa luar biasa atau siswa berkebutuhan khusus dalam memperoleh layanan pendidikan pada sekolah umum sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya (Norwich, B., 1996: 101). Seiring dengan perubahan paradigma pendidikan luar biasa tersebut, istilah atau *labelling* anak luar biasa bergeser atau berubah dari batasan yang cenderung diskriminatif (dengan sebutan anak luar biasa) ke arah yang lebih egaliter dengan sebutan anak atau siswa berkebutuhan khusus (*Children with Special Education Need*)

Salah satu jenis anak luar biasa yang memiliki perspektif lebih luas dalam mengikuti pendidikan terpadu adalah siswa tunanetra. Keterbatasan penglihatan yang dimiliki siswa tunanetra, bukanlah hambatan fatalistik untuk dapat mengikuti proses pendidikan, baik di Sekolah Luar Biasa maupun secara terpadu atau terintegrasi dengan siswa normal di sekolah umum. Beberapa bukti empiris dalam dunia pendidikan misalnya mahasiswa tunanetra di beberapa perguruan tinggi terutama mahasiswa tunanetra di UPI, menunjukkan bahwa apabila siswa tunanetra diberi kesempatan dan layanan pendidikan memadai, maka mereka dapat mengenyam pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi, dan bahkan sudah ada para tunanetra yang telah menamatkan pendidikan di S3. Fenomena kemampuan tunanetra untuk mengikuti pendidikan terpadu bukanlah suatu kebetulan, akan tetapi secara konseptualpun telah

diakui oleh ahli pendidikan siswa tunanetra. Misalnya, Hardman, L, et al. (1990: 25) dalam salah satu penelitiannya menemukan bahwa "kondisi ketunanetraan tidak memberikan dampak yang fatalistik terhadap perkembangan intelegensi dan kemampuan untuk mengikuti proses pendidikan dan karir."

Kondisi dan tantangan yang dihadapi siswa tunanetra yang mengikuti pendidikan terpadu berbeda dengan apa yang terjadi di sekolah luar biasa. Di sekolah terpadu, siswa tunanetra dihadapkan pada siswa-siswa yang normal atau siswa yang melihat, pola pembelajaran yang didesain secara umum, dan perlakuan yang menggunakan standar komunikasi orang-orang melihat. Untuk dapat memasuki dan menyesuaikan dengan lingkungan tersebut, jelas pada diri tunanetra diperlukan kesiapan mental-psikologis disamping kemampuan akademis. Manakala tunanetra belum memiliki kesiapan mental-psikologis, maka akan berat bagi tunanetra untuk dapat mengikuti pendidikan terpadu, bahkan diprediksi akan mengalami kegagalan.

Subagio (1999: 76) dalam penelitian ini menyatakan bahwa salah satu faktor kegagalan siswa tunanetra dalam mengikuti pendidikan terpadu seperti perilaku membolos bahkan sampai *drop-out* disebabkan oleh perasaan-perasaan rendah diri dan sulit berkomunikasi dengan teman sebaya yang melihat. Sedangkan, Meiyani, N. (2000: 119) mengemukakan bahwa, masalah yang dihadapi oleh siswa tunanetra dalam mengikuti pendidikan terpadu adalah kurangnya kemampuan

dalam bergaul dan bekerjasama dengan kelompok teman sebaya atau dengan kata lain siswa tunanetra mengalami kesulitan dalam mencapai tugas perkembangannya dalam belajar bergaul dan bekerja sama dengan kelompok sebaya. Permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian dan pemecahan secepatnya melalui layanan pendidikan yang lebih baik di dalam penyelenggaraan pendidikan terpadu.

Keterlambatan di dalam penanganan masalah ini akan berakibat semakin banyaknya siswa tunanetra yang gagal mengikuti pendidikan terpadu, dan ini merupakan kerugian yang cukup besar. Padahal sebagian siswa tunanetra memiliki kemampuan yang sama atau bahkan lebih baik dari siswa yang tidak tunanetra. Bila mereka mendapat layanan pendidikan yang baik mereka dapat meraih sukses dalam kehidupan, maupun bersaing dan secara akademis banyak juga yang mampu menyelesaikan pendidikan tingkat doktoral. Siswa – siswa tunanetra dalam perkembangan sosialnya mengikuti beberapa tahap untuk bisa menyesuaikan terhadap kehilangan penglihatan.

James J. Messina (2005) dalam Tarsidi (2005:14) mengemukakan bahwa terdapat lima tahap penyesuaian kehilangan penglihatan, yaitu *denial*, *bargaining*, *anger despair* dan *acceptance*. Pada tahap *Denial* ini, individu menolak bahwa kehilangan penglihatan itu telah terjadi dan mengabaikan tanda-tanda kehilangan tersebut, yang dimaksud dengan mengabaikan tanda-tanda kehilangan tersebut adalah tunanetra tidak

menyalahkan siapa-siapa, tidak peduli prinsipnya dia mau belajar dan ingin sukses.

Tahap *Bargaining*, menunjukkan dimana individu berusaha menerima takdir Tuhan, sehingga dia mempunyai keyakinan pada dirinya sendiri, dan penerimaan orang lain untuk mengatasi kehilangan penglihatan. Mereka bersedia dan berjanji melakukan apapun untuk mengatasi kehilangan penglihatan tersebut.

Tahap *Anger* timbul kemarahan individu kepada Tuhan, menyalahkan diri sendiri, atau kepada orang lain atas kehilangan yang dialaminya, dia menjadi sangat marah dan gusar terhadap langkah-langkah yang harus diambilnya untuk mengatasi kehilangan penglihatan yang dialaminya, dan mulai mengkambing hitamkan berbagai pihak untuk melampiaskan kemarahannya.

Pada tahap *Despair*, individu merasa dirinya terbenam kedalam kesedihan dan kepedihan yang diakibatkan oleh kehilangan penglihatan yang dialaminya, dan mulai menunjukkan berbagai respon emosional seperti menangis yang tidak terkendali, berdiam diri dalam kemurungan.

Pada tahap *Acceptance*, individu mulai mencapai tingkat kesadaran dan pemahaman tentang kehilangan penglihatan, antara lain sebagai berikut: (1) mampu mendeskripsikan situasi dan kondisi yang terkait dengan kehilangan yang dialaminya; (2) mendeskripsikan resiko dan keterbatasan perlakuan, menyesuaikan diri dengan kehilangannya; (3) menguji konsep-konsep dan berbagai alternatif yang ada untuk mengatasi

kehilangan tersebut; (4) memberi respon terhadap berbagai informasi seputar kehilangannya secara lebih cepat, dan mampu berpikir secara rasional; (5) mengadaptasikan perilakunya, menunjukkan respon emosi yang wajar; dan (6) memiliki kesabaran dan pemahaman diri yang baik, dan memiliki rasa percaya diri.

Proses penyesuaian diri terhadap kehilangan ini dapat berlangsung selama tiga bulan hingga tiga tahun. Keberhasilan dalam mengatasi setiap tahap respon terhadap kehilangan penglihatan tersebut akan memungkinkan individu mendapatkan kembali kestabilan emosinya dan mengadaptasikan keberfungsianannya, memperoleh bantuan dan dukungan dari luar diri individu selama proses duka cita akan menolongnya memperoleh objektivitas dan pemahaman yang tepat.

Dalam hal ini guru pembimbing sangat berperan untuk dapat mempersiapkan mental dan untuk meningkatkan kecakapan hidup para tunanetra sehubungan mereka memiliki potensi untuk menolong diri sendiri, memiliki pengetahuan dan kecakapan untuk hidup efektif dalam segala bidang kehidupan.

Hasil wawancara dengan beberapa siswa tunanetra, terungkap beberapa kecakapan hidup yang telah mereka miliki antara lain: kecakapan memainkan alat musik, *massage*, membuat kesed, bahkan banyak juga yang berhasil menjadi guru atau dosen. Kecakapan hidup yang mereka miliki tidak diperoleh dengan sendirinya, akan tetapi memerlukan intervensi pendidikan secara komprehensif.

Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari sistem pendidikan telah saatnya memfokuskan layanannya pada setting masyarakat terutama untuk para siswa tunanetra yang mengikuti pendidikan terpadu. Apabila siswa tunanetra telah mempersiapkan mental-psikologis dengan baik pada saat mengikuti pendidikan terpadu, maka mereka mampu mengembangkan *life skill* atau kecakapan hidupnya setelah tamat. Melalui bimbingan dan konseling berbasis kecakapan hidup hendaknya siswa tunanetra mampu memahami potensi dan kecakapan yang dimilikinya sesuai dengan bakat dan kemampuannya, mampu menghadapi permasalahan hidup dan mampu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Pendekatan pendidikan bagi siswa tunanetra berdasarkan kecakapan hidup (*life skill education approach*) merupakan pendekatan pendidikan integratif yang berupaya membantu siswa mengubah dan mengembangkan kecakapan yang spesifik. Salah satu tujuan pendekatan pendidikan ini adalah untuk memperoleh kecakapan hidup dalam menolong diri sendiri (*self helping skills*) sebagai salah satu ciri manusia terampil.

Menurut Havighurst, sekolah harus membekali anak agar terampil memenuhi tugas dalam hal: (1) memahami dan menerima baik keadaan jasmaniah; (2) memperoleh hubungan yang memuaskan dengan teman sebaya; (3) mencapai hubungan yang telah matang dengan orang dewasa; (4) mencapai kematangan emosional; (5) menuju keadaan berdiri

sendiri dalam lapangan finansial; (6) mencapai kematangan intelektual; (7) membentuk pandangan hidup; dan (8) mempersiapkan diri guna mendirikan rumah tangga sendiri (Gasda dan Brook. 1985).

Menyadari akan kondisi dan tantangan yang dihadapi siswa tunanetra dalam mengikuti pendidikan terpadu, maka intervensi pendidikan yang diberikan tidak terbatas pada proses pembelajaran di dalam kelas, akan tetapi membutuhkan intervensi bimbingan konseling. Urgensitas intervensi bimbingan dan konseling bagi siswa tunanetra yang mengikuti pendidikan terpadu, memiliki peranan strategis dalam memfasilitasi proses pembelajaran secara menyeluruh, dalam rangka mengembangkan kecakapan hidup dikemudian hari. Melalui ini diharapkan para tunanetra yang tidak dapat melanjutkan keperguruan tinggi, namun mereka dapat mengembangkan kecakapannya.

Hal yang terpenting dalam pendidikan terpadu adalah bagaimana siswa dapat memperoleh pendidikan berkualitas yang bermakna didalam lingkungannya yang alami dalam setting inklusif, masyarakat harus siap mengubah dan menyesuaikan sistem. Dikatakan bahwa "bukan sistem pendidikan kita yang memiliki hak anak-anak tertentu, melainkan sistem yang berlaku disebuah negara yang harus disesuaikan agar dapat memenuhi kebutuhan semua siswa" (UNESCO1994).

Berdasarkan dari hasil observasi pendahuluan di lapangan ternyata siswa tunanetra yang mengikuti pendidikan terpadu sudah tersebar di empat SMA, dengan jumlah siswa 13 orang. Adapun sekolah tersebut

adalah (1) SMA Negeri 7, (2) SMA Negeri 6 (3) SMA Purbagaya, (4) SMA PGII. Dengan paradigma dan kebijakan tersebut, dapat dipahami bahwa pelayanan pendidikan terpadu untuk siswa tunanetra tidak lagi dibatasi dalam konteks setting yakni di SLB Bagian Tunanetra, tetapi dapat dilaksanakan di sekolah umum dalam bentuk pendidikan terpadu dengan siswa normal.

Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini difokuskan pada berbagai upaya yang dilakukan guru pembimbing bekerja sama dengan guru mata pelajaran beserta personil sekolah lainnya terhadap siswa tunanetra dalam proses pembelajaran dan pelaksanaan layanan bimbingan untuk mengembangkan *life skill*nya. Kemudian dari temuan-temuan penelitian ini perlu dilakukan upaya perumusan prinsip-prinsip bimbingan untuk mengembangkan *life skill* bagi siswa tunanetra yang mengikuti pendidikan terpadu di SMA.

B. Fokus Penelitian

Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh siswa tunanetra banyak diantara mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Disebabkan sebagian dari mereka merasa tidak mampu menyesuaikan diri di sekolah, kesulitan dalam memahami pelajaran-pelajaran tertentu, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk bersosialisasi dengan lingkungan dan memahami materi pelajaran yang bersifat eksak.

Cutsforth (1951; dalam Hallahan dan Kauffman 1991) secara teoritis menyatakan ketidakmampuan menyesuaikan diri yang terjadi pada diri siswa tunanetra lebih diakibatkan oleh cara masyarakat memperlakukan tunanetra tersebut. Intinya reaksi masyarakat terhadap ketunanetraanlah yang menentukan tingkat penyesuaian diri individu tunanetra itu. Sedangkan di lapangan, individu yang mengalami kelainan penglihatan ternyata dapat mengerjakan beberapa pekerjaan dan memegang jabatan yang beragam. Fakta dilapangan menunjukkan, bahwa sebagian kecil para tunanetra telah berkarya dengan tugas-tugas sebagai, guru di sekolah luar biasa, sebagai dosen, wartawan, pemain musik, penyanyi, penterjemah tukang pijat atau operator telepon. Di lain pihak terdapat pula tunanetra yang memiliki prestasi akademik sama dengan siswa normal lainnya.

Tunanetra yang kemampuan vokasionalnya telah diakui oleh masyarakat dan telah berhasil dalam melaksanakan sesuai dengan profesinya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melihat dari dekat hal-hal yang dapat menunjang tercapainya kecakapan hidup mereka selama mengikuti pendidikan di SMA. Maka peneliti memfokuskan penelitian pada pelaksanaan bimbingan dan kerja sama pihak sekolah dengan instansi lain dalam mengembangkan kecakapan hidup (*life skill*) siswa tunanetra.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka fokus penelitian yang ditetapkan peneliti adalah "*Bagaimana prinsip-prinsip dan model bimbingan untuk pengembangan kecakapan hidup siswa tunanetra*

melalui kolaborasi antara konselor dan guru di SMA terpadu". Selanjutnya fokus penelitian dirinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi siswa tunanetra yang mengikuti pendidikan di SMA?
2. Kecakapan hidup apa saja yang dimiliki dan yang diharapkan siswa tunanetra?
3. Bagaimana mekanisme kerja sama, konselor, guru pembimbing khusus, guru mata pelajaran dan personil sekolah untuk mengembangkan kecakapan hidup (*life skill*) siswa tunanetra di SMA?
4. Bimbingan apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan kecakapan hidup bagi siswa tunanetra di sekolah terpadu?
5. Bagaimana implementasi bimbingan kecakapan hidup yang diperlukan untuk siswa tunanetra di sekolah terpadu?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan menemukan prinsip-prinsip dan model bimbingan untuk mengembangkan kecakapan hidup siswa tunanetra di sekolah terpadu dan dapat diterapkan oleh konselor, guru pembimbing khusus dan guru mata pelajaran dalam memfasilitasi siswa

tunanetra, sehingga siswa tunanetra mampu bekerja dan mampu hidup mandiri sesuai kemampuannya.

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Permasalahan yang dihadapi siswa tunanetra yang mengikuti pendidikan di SMA
2. Kecakapan hidup yang dimiliki dan yang diharapkan bagi siswa tunanetra.
3. Mekanisme kerjasama konselor, guru pembimbing khusus dan guru mata pelajaran, serta wali kelas dalam mengembangkan kecakapan hidup tunanetra di SMA.
4. Bimbingan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kecakapan hidup bagi siswa tunanetra di sekolah terpadu
5. Implementasi bimbingan kecakapan hidup yang diperlukan untuk siswa tunanetra di sekolah terpadu

E. Manfaat Penelitian

Prinsip-prinsip dan model bimbingan kecakapan hidup ini diperkirakan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah dari berbagai bentuk bimbingan yang telah dibangun oleh para peneliti terdahulu, dan dapat digunakan bagi guru pembimbing yang memiliki siswa tunanetra di SMA dalam rangka mengembangkan kecakapan hidup siswa tunanetra secara optimal sesuai batas kemampuannya. Prinsip-prinsip ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk penelitian yang lebih dalam tentang

bimbingan untuk mengembangkan kecakapan hidup bagi siswa tunanetra melalui kolaborasi konselor dan guru di SMA.

F. Asumsi Penelitian

Penelitian ini didasari oleh asumsi-asumsi berikut:

1. Siswa tunanetra dan penyandang cacat lainnya berhak dan membutuhkan pendidikan berkualitas tinggi.
2. Setiap individu dapat dilatih untuk menguasai berbagai macam kecakapan hidup.
3. Individu akan mencapai perkembangan secara optimal apabila terjadi interaksi yang sehat antara individu dengan lingkungan (Ahman, 1998:3)
4. Kondisi visual handicapped tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap potensi akademik tunanetra, tetapi *visual handicapped* tersebut berpengaruh terhadap pengembangan fungsionalitas dimensi intelegensi, apabila tunanetra tidak memperoleh layanan *Special Education Need* yang memadai (Hardman: L.et all 1990: 321).

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Pengembangan Kecakapan Hidup Siswa Tunanetra Melalui Kolaborasi Konselor dan Guru di Sekolah Terpadu". Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, dijelaskan beberapa istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini

1. Siswa tunanetra adalah individu yang mengalami kerusakan indra penglihatan sedemikian rupa, sehingga yang bersangkutan tidak dapat

memfungsikan penglihatannya sebagaimana orang normal, dan memerlukan layanan pendidikan yang dimodifikasi sesuai dengan karakteristik ketunetraannya atau memerlukan layanan pendidikan khusus.

2. Kecakapan Hidup dalam penelitian ini adalah kecakapan yang harus dimiliki oleh siswa tunanetra untuk menjalani kehidupan, sehingga mereka berani menghadapi masalah dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan agar dapat hidup layak dan memperoleh kebahagiaan
3. Bimbingan kecakapan hidup dalam penelitian ini adalah sebagai upaya pemberian bantuan kepada siswa tunanetra ke arah pengembangan kecakapan bidang personal, sosial, akademik, dan vokasional dengan mekanisme dan materi pemberian bantuan didasarkan pada analisis empirik mengenai permasalahan yang dihadapi tunanetra, kebutuhan bimbingan kecakapan hidup tunanetra, dan kerja sama antar guru pembimbing dengan pihak sekolah, orang tua, guru mata pelajaran, serta guru pembimbing khusus.
4. Pendidikan Terpadu adalah sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi siswa yang berkelainan, dalam hal ini adalah siswa tunanetra bersama-sama dengan siswa pada umumnya, upaya membantu individu yang mengalami kelainan kearah kehidupan yang baik. Oleh karena itu penyelenggaraan sekolah

terpadu tersebut difaksanakan di sekolah umum. Dalam pelaksanaan pendidikan terpadu mengacu kepada kurikulum yang berlaku.

5. Sekolah Menengah Atas Terpadu adalah jenjang pendidikan yang menampung semua siswa usia sekolah menengah umum termasuk siswa berkelainan, khususnya siswa tunanetra (Depdikbud, 1983/1984: 15). Sebutan sekolah menengah umum terpadu terbatas pada saat di sekolah tersebut terdapat siswa berkelainan yang belajar bersama dengan siswa normal. Sedangkan jumlah siswa dan jenis kelainan tidak ada pembatasan penerimaannya. Apabila sekolah tersebut tidak memiliki siswa yang berkelainan, selanjutnya sekolah tersebut kembali sebagai sekolah biasa.
6. Bimbingan adalah proses bantuan yang sistematis diberikan oleh konselor kepada siswa agar dapat; (1) memahami dirinya; (2) mengarahkan dirinya; (3) memecahkan masalah yang dihadapinya; (4) menyesuaikan diri dari lingkungannya (keluarga sekolah dan masyarakat) dalam rangka mengembangkan diri sesuai potensi-potensinya sehingga berguna bagi dirinya dan masyarakatnya.
7. Kolaborasi adalah kerja sama konselor dengan guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus dalam mengembangkan kecakapan hidup siswa tinanetra di sekolah terpadu.